

The nationalism movement of Islam for independence of Patani Southern Thailand (1902-1945)

Rosana Jehma^a, Sumardi^b, Sugiyanto^c

^a History of Education program, jember university. Email: san.husto1992@gmail.com

^b History of Education program, jember university. Email: Sumardi.FKIP@unej.ac.id

^c History of Education program, jember university. Email: Sugiyanto.unej.ac.id

Abstract

The conflict in Patani is a contradiction between the Patani and the kingdom of Siam, where's society Patani feel the loss of political rights even remove their culture as the muslim. So it appers the national Islamic Patani. This study aims to learn about the Islamic nationalist movement in southern Thailand Pattani independence in 1902-1945. This study uses historical research, while teh approach used is sosialogi political. The results showed that of various government policies thai want to escort and perpetuate the Patani region as the earth so that it conquered in 1902, a variety of reactions through the opposition in an effort to the pressure of the Kingdom of Siam. The implications of this research as a hope for other research or information considered to do the kind of research and development at the same time.

Keywords: Islam nationalism, Independence of Patani.

PENDAHULUAN

Patani merupakan salah satu provinsi negara Thailand, yang terletak di bagian Selatan, berpenduduk mayoritas Muslim dan bangsa Melayu. Patani pada awalnya merupakan kerajaan Islam yang berdaulat dan merdeka.

Sejak akhir abad-18, Kerajaan Patani merupakan taklukan Kerajaan Siam, tetapi Patani tetap otonomi, sehingga tahun 1902, Kerajaan Patani mulai menjadi bagian integral dari Kerajaan Siam, sejak inilah otonomi budaya dan masyarakat Melayu Patani mulai terancam. Karena, Kerajaan Siam Chulalongkorn mulai melakukan program pembaruan di bawah sistem *Thesaphiban* (sistem perubahan Negara Patani yang otonomi menjadi provinsi di bawah kekuasaan langsung dari pemerintahan pusat), yang bertujuan untuk menghapuskan identitas dan agama orang Melayu Patani. Maka sebab itulah menimbulkan rasa ketidak puas hati bagi masyarakat Patani, dan bangkit menentang atau memberontakan terhadap Kerajaan Siam (Mahmud, 2006:25).

Perubahan yang paling dirasakan oleh rakyat Patani pada masa pemerintahan Phibul Songkram (1939-1944) yang langsung menyetuh dasar-dasar orang Melayu telah menjadi dasar asimilasi kebudayaan yaitu, dilancarkan program *Rathaniyom* (Negara Thailand hanya untuk rakyat Thailand), suatu program yang didasarkan pada ultra-nasionalisme Siam. Program ini bertujuan untuk membentuk negara yang satu, berdasarkan satu agama, bangsa, bahasa dan kebudayaan Siam. Istimlah Siam menjadi Thailand juga ditukarkan pada masa ini (Saifullah, 2010:90).

Setelah dilaksanakan kebijakan itu (*Rathaniyom*), kemudian timbul berbagai pendapat yang berbeda di kalangan Melayu Muslim. Rasa kebersamaan di kalangan orang Melayu Muslim mendorong untuk tidak ingin diperintah oleh Pemerintah Siam, dan mereka ingin kembali memiliki hak otonomi seperti semula sekurang-kurangnya dalam bidang budaya, agama, dan hukum. Hal-hal demikianlah yang menjadi tuntutan dan perjuangan mereka sejak tahun 1902 hingga sekarang (Hasbullah, 2003:261).

Sejak Kerajaan Siam menaklukan dan menguasai kawasan Selatan secara integral, masyarakat Islam di Selatan seringkali melakukan reaksi melalui penentangan terhadap politik kerajaan Thai, atas sikap dan reaksi itu, kerajaan Thai pada zaman kerajaan monarki mutlak telah menjalankan dasar dan tindakan politik secara khusus terhadap kawasan itu. Strategi pentingnya adalah untuk mengawal dan mengekalkan wilayah tersebut sebagai

bumi taklukkannya (Capakiya, 2002:19). Karena faktor historis inilah, maka nasionalisme Melayu-Muslim ini telah terpupuk sejak ratusan tahun yang lalu.

Nasionalisme golongan Melayu-Muslim merupakan suatu nasionalisme reaktif yang lahir dari kekhawatiran terhadap kehilangan identitas mereka sebagai komunitas Islam (Abdullah, 1988: 297).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah: Bagaimana Latar Belakang Timbulnya Gerakan Nasionalisme Islam Patani Thailand Selatan (1902-1945). Bagaimana Gerakan Nasionalisme Islam Patani Thailand Selatan dalam Upaya Menghadapi Tekanan Kerajaan Siam (1902-1945).

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis Latar Belakang Timbulnya Gerakan Nasionalisme Islam Patani Thailand Selatan (1902-1945). Menganalisis Gerakan Nasionalisme Islam Patani Thailand Selatan dalam Upaya Menghadapi Tekanan Kerajaan Siam (1902-1945).

Manfaat penelitian ini: bagi penulis, memberi pengalaman serta mengasah kemampuan dalam menulis karya tulis ilmiah, bagi mahasiswa, dapat memberi wawasan mengenai Gerakan Nasionalisme Islam Patani Di Thailand Selatan, bagi masyarakat luas, dapat mengetahui faktor yang menyebabkan munculnya pemberontakan Patani di Thailand Selatan, bagi Pemerintah Indonesia, dapat mengetahui organisasi separatis Islam Patani yang ikut menuntut kemerdekaan dari Pemerintah Thailand.

KAJIAN LITERATUR

Nasionalisme Islam

Nasionalisme golongan Melayu-Muslim merupakan suatu nasionalisme reaktif yang lahir dari kekhawatiran terhadap kehilangan identitas mereka sebagai komunitas Islam. Sejak berakhirnya Perang Dunia ke II, daerah Melayu-Muslim di Thailand yang terdiri dari Patani, Yala dan Narathiwat, telah menyaksikan berbagai kerusuhan politik yang serius dan kekerasan yang mengancam kewenangan, legitimasi dan kekuasaan pemerintah Thai. Kekuatan-kekuatan yang membentuk dan berperan pada ketidak stabilan politik di kawasan ini adalah kekuatan-kekuatan nasionalisme etnis Melayu yang baru lahir (Abdullah, 1988: 297).

Patani independence

Patani di Thailand Selatan pada awalnya merupakan suatu kerajaan yang berdiri sendiri, yang dikenal sebagai Kerajaan Patani. Patani adalah kerajaan Islam yang berdaulat dan merdeka. Dalam arti mempunyai struktur politik, sosial, budaya dan ekonomi sendiri sesuai dengan kultur Melayu dan landasan agama Islam yang dianut kerabat kerajaan dan masyarakat. Negeri Patani merupakan kerajaan yang makmur dan terkenal sebagai pelabuhan utama yang menguasai perairan di Asia Tenggara (Malek, 1993:23).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Langkah-langkah metode penelitian sejarah meliputi empat tahap, yaitu: (1) heuristik (pengumpulan sumber), (2) kritik, (3) interpretasi, (4) historiografi (penulisan) (Gottschalk, 1986: 32). *Heuristik*, peneliti mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan Gerakan Nasionalisme Islam Dalam Kemerdekaan Patani Thailand Selatan (1902-1945). *Kritik*, kritik sumber dilakukan secara intern dan ekstern. Pada kegiatan kritik intern peneliti memperoleh fakta sejarah dari data-data yang telah diseleksi dan dibandingkan. *Interpretasi*, usaha untuk mewujudkan rangkaian fakta-fakta sejarah yang mempunyai kesesuaian satu sama lain yang kemudian dilakukan suatu penafsiran agar bermakna. *Historiografi*, penulis menyusun cerita sejarah. Bentuk cerita sejarah ini akan ditulis secara kronologis dan sistematis dengan topik yang jelas sehingga akan mudah dimengerti dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar belakang timbulnya gerakan nasionalisme Islam Patani Kondisi masyarakat patani sebelum 1902

Melayu Muslim Patani di Thailand Selatan pada awalnya merupakan suatu kerajaan tersendiri, yang dikenal sebagai Kerajaan Patani Raya. Patani Raya adalah kerajaan Islam yang berdaulat dan merdeka. Dalam arti mempunyai struktur politik, sosial, budaya dan ekonomi sendiri (Hasbullah, 2003:260). Proses Islamisasi mulai masuk ke Patani pada

abad ke-12 M, dan diresmikan menjadi sebuah negara yang beragama Islam pada abad ke-15 M (Malek, 1999:22).

Kerajaan Melayu Patani telah mencapai puncak keagungannya pada zaman pemerintahan raja-raja Perempuan (1584-1624) (Fathy, 2001:23). Keagungan dan kekuatan Patani tidak tetap. Berakhir pada zaman pemerintahan Raja Kuning (1635-1688), Patani mulai merosot. Patani dalam masa yang sedang menghadapi kekacauan politik, Siam sedang berperang dengan Burma.

Pada tahun 1779, Sultan Muhammad pula telah dipaksa memberi bantuan kepada Siam untuk menentang Burma. Apabila Sultan Muhammad enggan membuat demikian, Phraya Chakri telah memerintah adiknya, Putera Surasi, dengan dibantu oleh Phraya Senaphutan, Gubernur Pattalung, Palatcana dan Songkhla supaya menyerang Patani pada tahun 1785. (Malek, 1994:5).

Kerajaan Melayu Patani telah dipecahkan kepada tujuh buah negeri kecil atau *Hua Meang* untuk melemahkan orang Melayu Patani (Chapakiya, 2002:64). Tujuh buah negeri kecil itu, telah dilantikan seorang raja (*Chao Meang*) di bawah pengawasan Songkhla.

Pada 25 Mei 1900, setelah dua tahun Raja Abdul Kadir Kamariddin memangku pemerintah Raja Patani. Sungguhpun Raja Patani mempunyai hak dan berkuasa memerintah di Patani, tetapi pada realitasnya Raja Abdul Kadir tidak lagi mempunyai kekuasaan penuh.

Berakhirnya pemerintahan Kerajaan Melayu Patani sejak 1902

Sekitar abad ke-19, Kerajaan Siam Chulalongkorn, pun mulai merancang untuk menyusun kembali pentadbiran wilayah dan semakin menguatkan eksistensinya di Patani dengan mengeluarkan kebijakan *Thesaphiban*. Kebijakan tersebut mengakibatkan kerajaan Negeri Patani tidak lagi mempunyai kuasa otonomi dan menghapus seluruh sistem pemerintahan kesultanan Melayu di Patani. Dampak diberlakukannya penghapusan kesultanan Melayu tersebut, kerajaan Patani semakin lemah dan tertekan dari kerajaan Siam. Tindakan Kerajaan Siam itu telah mencetus konflik diantara Raja-Raja Melayu Patani dengan Kerajaan Siam. (Mahmud, 2006:25).

Perubahan dasar pemerintahan Siam ini disebabkan kehadiran kuasa-kuasa penjajah dengan dasar imperialisme di Asia Tenggara telah menimbulkan kekhawatiran Siam terhadap

keutuhan wilayahnya, terutamanya wilayah-wilayah yang terpecil dari kawalan kerajaan pusat di Bangkok seperti Negeri-negeri Melayu di Selatan Siam. Kerajaan Siam khawatir jika wilayah-wilayah ini tidak diintegrasikan di bawah kuasa Siam kemungkinan besar wilayah-wilayah tersebut akan dikuasai oleh kuasa-kuasa Barat (Malek, 1993:130).

Tindakan Raja Patani Abdul Kadir yang mewakili Raja-raja Melayu yang lain telah menolak peraturan baru pentadbiran dan ini telah menimbulkan kemarahan pihak berkuasa Siam Bangkok (Malek, 1994:84).

Akhirnya pada 10 Maret 1909 perjanjian sempadan yang dikenal juga sebagai Anglo-Siam (perjanjian membagi tanah jajahan di sempadan) telah ditandatangani oleh Menteri Luar Siam untuk pihak Siam dengan Inggris di Tanah Melayu (Daud, tt:79). Tentu saja usaha-usaha ini tidak dapat diterima oleh golongan-golongan minoritas yang memiliki budaya hidup yang berlainan dari pada bangsa Siam, terutamanya oleh orang-orang China dan Melayu.

Situasi di Patani kemudiannya semakin mendesak, pada bulan Desember 1938, ketika Phibun Songgram telah dilantik menjadi Menteri Pertahanan dan dengan ini kekuatan tenteranya amat berkesan sekali dalam membinakan peranannya. Phibun Songgram adalah seorang yang kuat berfahaman kebangsaan Siam, dan dilantik menjadi Menteri Luar Negeri. Phibun Songgram melaksanakan dasar pentadbirannya yang akan mengubah fikiran rakyat dalam dan luar negeri. Orang-orang Siam telah dibentuk supaya mencintai negaranya. Pada 24 Juni 1939 dengan resminya nama Muang Thai telah digantikan menjadi Thailand (Suaedy, 2012:59).

Kejayaan pembaharuannya telah menyebar ke dunia luar, maka tindakan *Ratthaniyom Thai* diperkenalkan serta diperlantikkan kepada rakyat. Phibun Songgram memulakan amalan sosial dengan menyebarkan risalah mengenai cara-cara dan amalan kehidupan orang-orang Barat termasuk juga penerangan mengenai dasar-dasar kerajaan. Kaum perempuan dan lelaki harus memakai celana panjang, berbaju kemeja, bersepatu, bertopi, berpakaian kemas dan mengambil unsur-unsur kehidupan Barat untuk kehidupan sehari-harinya. Usaha juga supaya menghentikan kebiasaan memakan sirih-pinang. Sistem pendidikan pula diletakkan di bawah kawalan yang ketat. Sekolah semua diwajibkan mengikut kurikulum pelajaran Siam dan sebagainya (Syukri, 2002:106).

Akibat melaksanakan tindakan itu, orang-orang Melayu terutamanya golongan ulama merasa gelisah karena dilarang memakai kain serban di kepala. Bahasa Melayu telah diharamkan. Orang-orang Melayu harus digantikan nama mereka kepada nama Siam-Buddh dan segala kegiatan agama Islam telah disekat karena Buddha adalah Agama resmi Negara Siam. Orang-orang Islam terpaksa menukarkan agamanya melalui sembah patung. Sejak melaksanakan tindakan itu di wilayah-wilayah Patani, masyarakat Melayu Patani merasa keresahan. Sikap penetapan umat Islam Patani telah memuncak sehingga munculnya konflik dengan Kerajaan Thai, karena adat-adat dan kebudayaan orang-orang Melayu Patani telah dihilangkan.

Tekanan Phibun Songgram telah memberi kesan yang mendalam di hati orang-orang Melayu Patani. Mereka merasa kehilangan kebudayaan yang menjadi teras identitas Melayu telah dicabuli menerus usaha-usaha penindasan. Agama Islam yang dicintai semakin tercemar, maruah bangsa telah dinodai. Orang-orang Melayu memang sensitif mengenai sesuatu yang menyetuh tentang Islam dan bangsa Melayu. Telah timbul perasaan benci terhadap keganasan tentara dan polis Thai yang tidak. Dengan keadaan tersebut orang-orang Melayu Patani bangkit melawan penjajahan Siam untuk menjaga identitasnya dengan cara berbagai bentuk.

Gerakan nasionalisme Islam Patani dalam upaya menghadapi tekanan Kerajaan Siam

1) Pemberontakan terhadap program pembaruan

Reaksi kolektif yang pertama terhadap program pembaruan administratif di daerah Patani yang terjadi satu tahun setelah di mulainya pembaruan itu. Gerakan ini dikoordinasi oleh Raja Patani, Abdul Kadir, dengan menggunakan dua strategi yaitu, perlawanan umum untuk memancing tindakan-tindakan penindasan yang lebih keras dari pihak penguasa Thai sehingga akan mencetuskan pemberontakan yang hebat terhadap sistem baru itu, dan bersama dengan itu, diusahakan untuk minta campur tangan dengan pihak kuasa asing, terutama dari Inggris (Hasbullah, 2003:262).

Dasar pembaruan yang dilakukan oleh Kerajaan Siam tidak dapat diterima oleh Raja Patani dan rekan-rekannya. Berbagai cara dilakukan oleh Kerajaan Siam untuk

mempengaruhi raja-raja Melayu supaya memberi tandatangan persetujuannya atas dasar pembaruan.

Apabila Abdul Kadir merasa enggan mau menandatangani persetujuan itu, dan berbagai cara dilakukan terhadap pemerintah supaya memprotes dasar pembaruan tersebut. Di samping itu juga Abdul Kadir minta bantuan dari pihak Inggris untuk campur tangan (Ayah Bangnara, 1976:47).

Pergerakan raja-raja Melayu itu dipandang berbahaya dan mengancam keamanan negara, karena mereka melibatkan kekuasaan asing untuk campur tangan. Dengan itu kerajaan pusat di Bangkok telah mengambil tindakan keras. Kemudian Raja Abdul Kadir dan rekan-rekannya di tangkap dan di penjara (Capakiya, 2002:71).

2) Reaksi penahanan Abdul Kadir Kamarudin

Penahanan Abdul Kadir dan rekan-rekannya, telah menimbulkan kemarahan dan kebencian yang menyeluruh di kalangan orang-orang Melayu di tujuh wilayah, termasuk juga di Semenanjung, terhadap Kerajaan Siam (Malek, 1993:154).

Kaum kerabat Diraja Patani, Raja-raja Melayu, orang perseorangan dan akhbar-akhbar Negeri-negeri Selat telah mendesak Kerajaan Inggris supaya campur tangan dan membebaskan Raja Patani daripada tahanan Kerajaan Siam. Mereka juga mendesak Kerajaan Inggris supaya mengambil alih tujuh wilayah di Selatan daripada pihak Siam.

Sebagai suatu usaha ke arah menyelesaikan masalah tidak puas hati penduduk-penduduk tempatan terhadap Kerajaan Siam dan juga untuk meredakan tekanan-tekanan pihak Inggris yang berusaha membantu raja-raja Melayu. Kerajaan Siam mengambil keputusan untuk membebaskan Bekas Raja-raja Melayu. Bulan April 1903, Raja Shamsuddin dan Raja Abdul Mutalib, telah dibebaskan setelah keduanya bersetuju untuk menerima peraturan 1901, untuk melaksanakan di negeri Masing-masing.

Raja Abdul Kadir telah dibebaskan pada 5 Maret 1904, setelah mengistiharkan bahwa beliau tidak akan melibatkan diri ataupun bergiat dalam politik dan akan patuh kepada Kerajaan Siam (Mahmud, 2006:48). Meskipun setelah berhasil membebaskan Raja Patani itu, akan tetapi, Kerajaan Siam juga berhasil menjalankan sistem pembaruan yang direncanakan pada tahun 1901. Negeri Patani sendiri telah dicantum dengan negeri-

negeri Patani lain yang dikenal sebagai *Boriwen Patani* (wilayah Patani) bukan lagi negeri Patani.

3) Kebangkitan di kampung Beluka Samak

Pemberontakan yang paling besar telah berlaku di Beluka Samak pada tahun 1923. Sebuah kampung yang terletak dalam daerah Rakak. Pemberontakan ini berpunca daripada tindakan Kerajaan Siam yang Ingin mengintegrasikan masyarakat Melayu yang dianggap minoritas ke dalam masyarakat Siam melalui proses pendidikan. Dimana Kerajaan Siam telah meluluskan Akta Pelajaran pada 1921, yang mewajibkan kanak-kanak belajar di sekolah Kerajaan Siam yang menggunakan bahasa Siam sebagai bahasa pengantar. Bagi menjayakan rancangan tersebut, pusat-pusat pengajian agama seperti, pondok dan masjid diharamkan supaya mengubah dan menyesuaikan sukatan pelajaran mengikut garis yang ditetapkan oleh Kerajaan Siam (Fathy, 2001:75).

Oleh karena bimbang anak-anak mereka akan disiamkan atau dibuddhakan melalui pendidikan di sekolah kebangsaan Siam. Maka orang-orang Melayu enggan menghantar anak-anak mereka ke sekolah kerajaan yang kebetulannya pula dikendalikan oleh semi-semi Buddha.

Awalnya bulan Januari 1923, pertempuran telah tercetus di antara ahli-ahli PMAI (Pakatan Mempertahankan Agama Islam) dengan pasukan polisi di Beluka Samak. Ramai daripada pemimpin tempatan yang telah dituduh bersubhat dalam PMAI itu telah ditangkap dan dihukum penjara. Sejak dari peristiwa itu, Kerajaan Siam mulai menjalankan langkah-langkah kawalan yang sangat ketat, untuk mengawal pemimpin-pemimpin Melayu tempatan. Tangkapan dilakukan ke atas orang-orang yang disyaki menjadi pemimpin pergerakan pembebasan tersebut. (Mahmud, 2006:52).

4) Berpartisipasi politik Thai untuk mempertahankan otonomi

Rampasan kuasa atau kudeta yang mengakhiri kekuasaan Mutlak raja-raja Siam pada 24 Juni 1932, peristiwa ini tidak menumpahkan darah oleh kumpulan yang menamakan dirinya *Khana Rasdon* (Partai Rakyat) ini memulakan satu era baru dalam sejarah politik Negara Thai. Bagi orang-orang Melayu di Patani, perubahan itu sangat mengembirakan, mereka mengharap agar di bawah sistem parlemen, peluang mereka untuk memproleh

konsesi-konsesi dari pemerintah pusat untuk mempertahankan otonomi mereka dalam urusan-urusan keagamaan, kebudayaan dan kebangsaan (Ayah Bngnara, 1976:50).

Dari partisipasi efektif pada tahap awal itu, sejumlah sarjana telah menarik kesimpulan bahwa intergrasi diharapkan akan terwujud dan bahwa pimpinan Melayu-Muslim secara berangsur-angsur sedang diserap kedalam sistem politik nasional. Faktanya adalah bahwa sejak awalnya, orang-orang melayu-muslim di Selatan menenmpuh suatu kebijakan “partisipasi terbatas”. Untuk mencapai tujuan yang dekat, yakni berparti sipasi dalam forum nasional, dimana mereka dapat menyatakan harapan-harapan dan kekhawatiran-kekhawatiran mereka, mereka ikut dalam proses politik, tetapi untuk mencapai tujuan akhirnya yakni otonomi politik (Hasbullah, 2003:262).

Harapan para pemimpin Melayu untuk dapat menghentikan penetrasi pemerintahan pusat ke dalam masyarakat Melayu Patani ternyata tidak kekal. Peran dan parlemen hanya terbatas kepada pengungkapan keluhan-keluhuan atas nama rakyat pada umumnya. Kekuasaannya untuk mengawasi kebijakan dan program yang telah dirumuskan untuk berbagai daerah dan provinsi, sangat kecil. Orang Melayu-Muslim Patani Raya jelas sangat dikecewakan oleh kegagalan sistem itu (Pisuwan, 1989:67).

5) Reaksi terhadap Kerajaan Phibun dan politik rathaniyom

Phibun Songgram adalah seorang ultra-nasional yang bercita-cita besar dan berdisiplin. Dengan mempunyai latar belakang pendidikan Eropa, berusaha membentuk Negara Thai sebagai sebuah negara nasional modern yang maju. Phibun melancarkan suatu program dengan bertujuan untuk menjadikan semangat kebangsaan Siam. Kesadaran hanya dapat tercapai melalui sosial-budaya yang berasaskan konsep nasionalisme (Nurdi, 2010:66).

Rathaniyom (Negara Thailand hanya untuk rakyat Thailand) telah dikemukakan oleh Phibun Songgram sebagai ideologi politik negara. *Rathaniyom* adalah kebudayaan negara yang dibentuk oleh menteri kabinet dan digunakan sebagai dasar arahan dari jabatan perdana menteri. Bertujuannya untuk menjadikan kebudayaan tersebut sebagai budaya tetap negara yang bulih dihayati oleh semua rakyat tanpa mengira bangsa dan agama. *Rathaniyom* mempunyai 12 pasal, yang di keluarkan antara 1939-1942. Dari pada 12 pasal,

hanya 3 pasal yang mendesak masyarakat Islam secara langsung yaitu *Rathaniyom* pasal 3, pasal 9 dan pasal 10 (Chapakiya, 2002:93).

Rathaniyom pasal 3 “panggilan nama rakyat Thai” menentukan panggilan kepada semua penduduk negara dengan *Khonthai* (orang Thai). *Rathaniyom* pasal 9 “bahasa Thai dan tanggungjawab warganegara yang baik”. Bagi masyarakat Islam di Patani, masih menganggapkannya sebagai bahasa asing dan bahasa agama Buddha. Sedangkan *Rathaniyom* pasal 10 “pakaian penduduk warganegara Thai” semua rakyat Thai terpaksa memakai pakaian seperti Eropa. Keadaan terpaksa ini menjadikan masyarakat Islam berada dalam keadaan delima. Orang-orang Melayu Islam menghadapi tekanan (Hasbullah, 2003:263).

Menjelang tahun 1943, keadaan masyarakat Islam bertambah genting apabila Kerajaan Phibun membatalkan Undang-Undang Islam dalam hal keluarga, pusaka serta memansukh jawatan *Datuk Yuthitham* (pengadilan). Masyarakat Islam dipaksa menerima Undang-Undang sivil negara yang bercanggah dengan syariat agama. Orang-orang Islam kini tidak lagi mempunyai hakim dan kadi. Dalam suasana tertekan, masyarakat secara keseluruhan mengambil sikap tidak menerima Undang-Undang negara tersebut dan tidak lagi mengindahkan peraturan dan Undang-undang kerajaan.

Pihak berkuasa (Pemerintahan Thai) di Patani meneruskan sikap yang keras untuk memaksakan dan menanamkan masyarakat Islam mematuhi politik *Rathaniyom* dan peraturan umum kerajaan. Bahkan memaksa masyarakat Islam menghormati berhala agama Buddha.

Semenjak akhir Perang Dunia Kedua, kepemimpinan gerakan Melayu-Muslim di Thailand Selatan telah beralih dari para politisi dan bangsawan ke para ulama. Para politisi dan bangsawan, karena terlalu gigih menentang perintah-perintah kebudayaan di masa pemerintahan Phibun Songgram, telah terpaksa menyembunyikan diri. Salah seorang ulama yang menonjol pada saat itu adalah Haji Sulong, yang pada tahun 1947 memimpin sebuah aksi menuntut “otonomi hukum bagi orang-orang Melayu-Muslim” (Pitsuwan, 1989:86).

Tuntutan tersebut sebenarnya bersifat minimal, dalam arti, Haji Sulong tidak menuntut suatu kedaulatan penuh atau negara merdeka, tetapi hanya sebuah entitas teritorial budaya yang otonom menggunakan mempertahankan identitas mereka yang khusus, yang berbeda

dengan identitas bangsa Thai. Aksi perlawanan pimpinan Haji Sulong tersebut mendapat perhatian para dunia yang cukup besar. Hal ini membuat tekanan politik internasional atas pemerintahan Thai semakin kuat. Hasilnya, untuk pertama kalinya masalah Melayu-Muslim di Thailand Selatan ini masuk ke dalam PBB dan Liga Arab (Hasbullah, 2003:265).

PENUTUP

Kesimpulan

Melayu Muslim Patani di Thailand Selatan pada awalnya merupakan suatu kerajaan Islam yang berdaulat dan merdeka. Kerajaan Patani dapat ditaklukan oleh Kerajaan Siam pada bulan November 1785, dan dibagi-bagi menjadi tujuh buah negeri kecil pada tahun 1816, negeri Patani perlahan-lahan kehilangan identitasnya sebagai sebuah negeri Melayu yang merdeka. Sehingga abad ke 19, Kerajaan Siam mulai melakukan pembaruan sistem pentadbiran mengikut sistem *Thesaphiban*. Secara menyeluruh kerajaan Negeri Patani tidak lagi mempunyai kuasa otonomi dan menghapus sistem pemerintahan kesultanan. Dampak dari sistem itu, Kerajaan Patani semakin lemah dan tertekan dari kerajaan Siam. Sehingga timbul konflik diantara Raja-Raja Melayu Patani dengan Kerajaan Siam pada tahun 1902.

Gerakan Nasionalisme Islam Patani terbentuk karena masyarakat Islam berketurunan Melayu di Patani merasakan kehilangan hak-hak politik dan pentadbiran secara menyeluruh. Bahkan menghapus kebudayaannya sebagai orang-orang Melayu dan ciri-ciri kehidupan masyarakat Islam. Maka munculnya berbagai gerakan dalam upaya menghadapi tekanan Kerajaan Siam yaitu, reaksi terhadap program pembaruan, kebangkitan di Beluka Samak dan berbagai pemberontakan lagi yang dilakukan oleh umat Islam. Upaya yang dilakukan umat Islam tersebut bertujuan untuk mendapatkan hak-hak otonomi dalam mempertahankan identitas bangsa Melayu yang beragama Islam mereka yang khusus.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyajikan beberapa saran, yaitu: (1) Penulis menyarankan kepada masyarakat umum untuk lebih aktif melakukan penelitian

sejarah. Dengan giatnya melakukan penelitian ilmiah, khususnya tentang nasionalisme Islam Patani di Thailand Selatan; (2) Penulis menyarankan kepada mahasiswa khususnya mahasiswa Patani untuk mengkaji sejarah Patani agar lebih menambah wawasan khususnya tentang gerakan nasionalisme Islam Patani di Thailand Selatan; (3) Penulisan skripsi ini memang jauh dari sempurna dan kelengkapan, baik dari segi bahasa dan tata tulis, sehingga penulis dari skripsi ini meminta saran dan kritiknya yang membangun untuk penulisan ke depan. Dengan demikian akan ada perbaikan-perbaikan dalam diri penulis.

UCAPAN TERIMAKASIH

Rosana Jehma mengucapkan terimakasih kepada Dr. Sumardi, M.Hum, dan Drs. Sugiyanto, M.Hum yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran demi terselesainya jurnal ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman sekalian yang telah membantu penulis dan memberikan semangat untuk terselesainya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T. dan Siddique, S. (1988). *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Bangnara, A. (1976). *Patani Darussalam*. Oleh Ayah Pathoni dan Yah Jala. Bangkok: Pinal Penyelidikan Angkatan Al-Fathoni.
- Chapakia, A. O.(2002). *Politik dan Masyarakat Patani Selatan Thailand 1902-1922*. University Kebangsaan Malaysia.
- Daud, A. Tt. *Negara Patani Darussalam*. Teluban: p.
- Fathy, A. (2001). *Pengantar Sejarah Patani*. Kota Baru: Pustaka Aman Peres.
- Gootscahlk, L. (1969). *Mengerti Sejarah*. Terjemah oleh Nugroho Notosusanto 1986. Jakarta: universitas Indonesia Press.
- Hasbullah, M. (2003). *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam*. Bandung: Fokusmedia.
- Kohn, H.(1984). *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*. Jakarta: P.T. Pembangunan dan Penerbit Erlangga.

- Malek, M. Z. (1993). *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik*. Malaysia: Hisbi Shah Alam.
- Malek, M. Z. (1994). *Patani dalam Tamadun Melayu*. Malaysia: Dewan Bahasa Dan Perpustakaan Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Malek, M. Z. (1999). *Harimau Malaya Biografi Tengku Mahmud Mahyiddeen* University Kebangsaan Malaysia: Bangi.
- Mahmud. (2006). *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1945*. Universitas Kebangsaan Malaysia: Bangi.
- Nurdi, H. (2010). *Perjuangan Muslim Patani Sejarah Perjuang penindasan dan Cita-cita Perdamaian*. Kuala Lumpur: Alam Raya Enterprise SDN BHD.
- Pitsuwan, S. (1989). *Islam di Muangthai Nasionalisme Melayu Masyarakat Patani*. Jakarta: LP3ES.
- Saifullah. (2010). *Sejarah dan Kebudayaan Islam Di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suaedy, A. (2012). *Dinamika Minoritas Muslim Mencari Jalan Damai*. Jakarta: Puslitbang Lektor dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Dan Kementerian Agama.
- Sujiono, S. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Syukri, I. (2002). *Sejarah Kerajaan Melayu Patani*. University Kebangsaan Malaysia: Bangi.